

Kajian Arah Kebijakan Penyediaan Ruang Kota Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang

Nur Khasanah Apriliasari

Diterima : 29 September 2017

Disetujui : 1 Desember 2017

ABSTRACT

Street vendors (PKL) are one of the informal sectors that are often viewed as a parasite sector and have a negative impact on the city's image. However, the existence of street vendors also become one of the highest city's economic support and provide benefits for the community. Rukmana (2008) states that street vendors are an integral form of urban transformation from their economic system, from agriculture-based society to industry and services. Thus, the informal sector including street vendors need to be considered in the provision of space in urban areas. Street vendors in the educational area of Tembalang increasingly mushrooming after the transfer of Undip Pleburan students to Tembalang. The street vendors use public spaces and interfere with other space users, especially pedestrians and road users. This research uses positivistic-rationalism approach with quantitative research method to determine the direction of city space provision for street vendors in Tembalang educational area. The result of this research is the provision of city space for street vendors in Tembalang Educational Area directed by arranging PKL activity on strategic and accessible road corridor. Provision of space for street vendors as stated in the Decree of Mayor of Semarang no. 511.3 / 16 2001 on Land Stipulation / Location PKL needs to be reviewed because it has not contain the characteristics and needs of street vendors and consumers. The capacity of the existing space has not been able to accommodate the needs of street vendors in Tembalang Education Area in the future.

Keywords: PKL, Provision of city space, Policy

ABSTRAK

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang sering dipandang sebagai sektor parasit dan memberikan dampak negatif pada citra kota. Namun, keberadaan PKL juga menjadi salah satu penopang ekonomi kota yang cukup tinggi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Rukmana (2008) menyatakan bahwa PKL merupakan bentuk transformasi perkotaan yang tidak terpisahkan dari sistem ekonominya, yaitu dari masyarakat berbasis pertanian ke industri dan jasa. Dengan demikian, sektor informal termasuk PKL perlu diperhatikan dalam penyediaan ruangnya di perkotaan. PKL di kawasan pendidikan Tembalang semakin menjamur setelah berpindahnya mahasiswa Undip Pleburan ke Tembalang. PKL menggunakan ruang-ruang publik dan mengganggu pengguna ruang lainnya, khususnya pejalan kaki dan pengguna jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik-rasionalism dengan metode penelitian kuantitatif guna menentukan arahan penyediaan ruang kota bagi PKL di kawasan pendidikan Tembalang. Hasil dari penelitian ini adalah penyediaan ruang kota bagi PKL di Kawasan Pendidikan Tembalang diarahkan dengan melakukan penataan aktivitas PKL pada koridor jalan yang strategis dan aksesibel. Penyediaan ruang bagi PKL sebagaimana tercantum dalam SK Walikota Semarang No. 511.3/16 2001 tentang Penetapan Lahan/ Lokasi PKL perlu ditinjau kembali karena belum mawadahi karakteristik dan kebutuhan PKL maupun konsumen. Daya tampung ruang yang ada belum mampu menampung kebutuhan ruang PKL di Kawasan Pendidikan Tembalang kedepan.

Kata Kunci: PKL, Ruang Kota, Kebijakan

¹ Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah
Kontak Penulis : aprilia.chuby90@gmail.com

² Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perkotaan seiring dengan penambahan jumlah penduduk juga diiringi dengan pertumbuhan sektor informal di perkotaan. Sektor informal hingga saat ini masih sering ditengarai sebagai dikotomi dari sektor formal, sehingga sering kali dinilai sebagai hal yang negatif. Pertumbuhan sektor informal yang cukup menarik perhatian adalah pedagang kaki lima (PKL) yang meskipun sering dinilai sebagai sumber permasalahan ruang kota, tetapi keberadaannya masih tetap eksis dalam mengisi ruang perkotaan. Bahkan PKL semakin bertambah dan disisi lain memberikan manfaat dan sumbangan ekonomi yang cukup berarti bagi perekonomian perkotaan. Rukmana (2008) mengungkapkan bahwa wujud ketersediaan lapangan pekerjaan bukan hanya pada sektor formal melainkan juga sektor informal, sehingga yang menyebabkan permasalahan PKL sebenarnya adalah kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL yang tumbuh di perkotaan.

Kawasan pendidikan Tembalang memiliki perkembangan aktivitas komersial baik sektor formal maupun informal yang pesat disebabkan adanya aktivitas pendidikan tinggi, sehingga memberikan daya tarik bagi kegiatan-kegiatan komersial. Perkembangan sektor informal khususnya PKL semakin pesat mengisi ruang-ruang publik yang ada, seperti trotoar/ bahu jalan, bawah jembatan tol, serta emperan-emperan toko. Kondisi ini semakin terlihat meningkat setelah pindahnya mahasiswa UNDIP Pleburan ke kawasan ini. Permasalahan yang terjadi adalah kepadatan lalu lintas semakin meningkat, kemacetan karena kapasitas jalan yang sudah tidak memadai, terganggunya pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya karena dimanfaatkan PKL, keindahan dan ketidakteraturan penataan ruang. Disisi lain, keberadaan PKL ini memberikan manfaat dan kemudahan kepada masyarakat khususnya mahasiswa dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ruang yang disediakan dalam SK Walikota Semarang Nomor 511.3/16 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001, untuk kawasan pendidikan Tembalang berada di pinggir jalan (Jl. Prof. Soedharto, Jl. Sirajuddin, Jl. Banjarsari, dan Jl. Timoho Raya) dengan pembatasan waktu pada pukul 16.00 – 04.00. Namun, perkembangan PKL di kawasan ini sangat pesat, bahkan di luar koridor jalan-jalan tersebut dan waktu yang digunakan juga lebih variatif, sehingga mengganggu aktivitas lainnya. Aktivitas PKL masih menimbulkan konflik dengan pengguna ruang lainnya terutama pengguna jalan. PKL juga masih ada yang menempati ruang-ruang publik yang menjadi zona larangan yang rentan akan penggusuran. Oleh karena itu, diperlukan kajian arahan penyediaan ruang kota bagi PKL di kawasan pendidikan Tembalang, Kota Semarang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan positivistik-rasionalism, yaitu selain mendasarkan pada teori, kasus dan studi literatur, juga logika dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penggunaan pendekatan positivistik-rasional ini diharapkan dapat melihat permasalahan secara komprehensif dan menjawab tujuan penelitian dari beberapa sudut pandang, sehingga hasil yang diperoleh lebih relevan dan operasional. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui karakteristik ketersediaan PKL, kebutuhan ruang PKL, serta preferensi PKL dan masyarakat akan ruang untuk PKL. Penggabungan dari keduanya diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih realistis dan relevan untuk diterapkan.

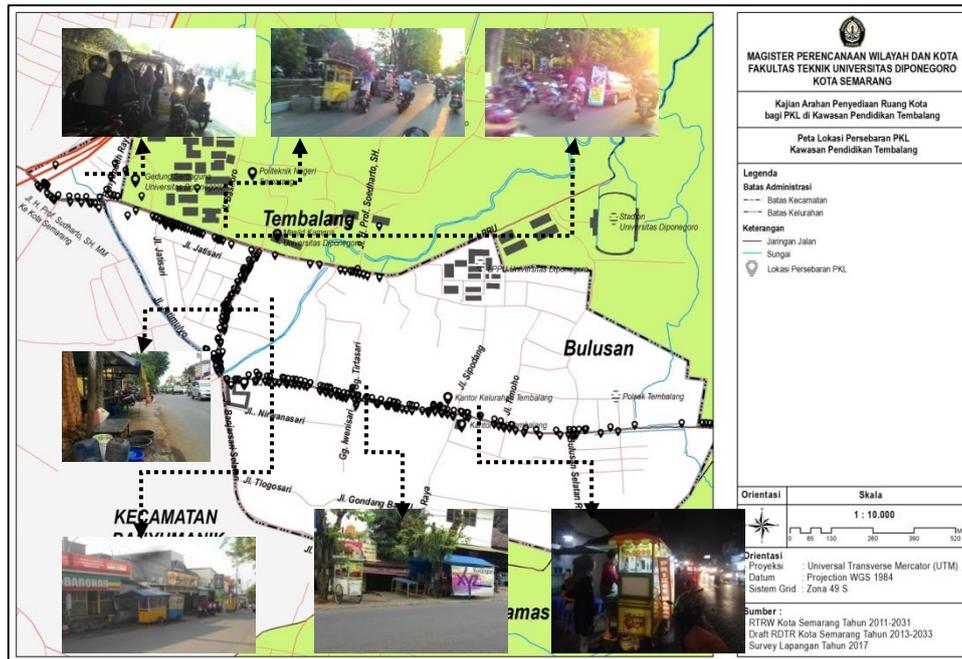
GAMBARAN UMUM

PKL di kawasan pendidikan Tembalang merupakan bagian dari struktur perekonomian di Kota Semarang Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu kota yang menjadi pusat urbanit sehingga banyak penduduk desa yang hijrah ke kota ini untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah PKL di lokasi studi berdasarkan kajian pada tahun 2008, jumlah PKL di lokasi studi sebanyak 104 unit dengan sebaran 50 PKL di Jl. Prof. Soedharto, 13 PKL di Jl. Jatimulyo, 15 PKL di Jl. Sirajuddin, dan 26 PKL di Jl. Banjarsari (Sulistianto, 2008). Pada kondisi saat ini, jumlah PKL semakin meningkat dan berkembang ke daerah timur seperti Gondang, Timoho, dan Bulusan. Berdasarkan hasil survei (2016), jumlah PKL di lokasi studi kawasan pendidikan Tembalang mencapai 234 unit, dengan sebaran sebagai berikut:

TABEL 1
JUMLAH DAN SEBARAN PKL DI KAWASAN PENDIDIKAN TEMBALANG TAHUN 2016

No.	Jalan	Jumlah PKL
1.	Jl. Prof. Soedharto	63
2.	Jl. Sirajuddin	45
3.	Jl. Jatimulyo	16
4.	Jl. Banjarsari	60
5.	Jl. Timoho Raya/ Bulusan	30
6.	Jl. Gondang Raya	20
	Jumlah	234

Sumber : Hasil Analisis, 2016



Sumber : Hasil Analisis, 2016

GAMBAR 1
PERSEBARAN PKL DI KAWASAN PENDIDIKAN TEMBALANG

PKL-PKL yang terdapat di kawasan pendidikan Tembalang selain memiliki jam operasional yang variatif, juga memiliki karakter jenis dagangan yang beraneka ragam. Berdasarkan pengelompokan jenis dagangannya, PKL yang ada di kawasan ini terdiri atas 4 jenis PKL,

yaitu PKL makanan siap saji (*prepared food*), makanan mentah/ setengah jadi (*unprocessed and semiprocessed food*), PKL bukan makanan (*non food*), dan PKL jasa (*servlices*). Adapun jumlah untuk masing-masing jenis dagangan di tiap koridor jalan diidentifikasi sebagai berikut:

TABEL 2
SEBARAN PKL BERDASARKAN JENIS DAGANGAN DAN LOKASI BERJUALAN
DI KAWASAN PENDIDIKAN TEMBALANG TAHUN 2016

No.	Jalan Jenis Dagangan	Prepared Food	Unprocessed and Semiprocessed Food	Non Food	Services	Jumlah
1.	Jl. Prof. Soedharto	47	1	10	5	63
2.	Jl. Sirajuddin	37	3	3	2	45
3.	Jl. Jatimulyo	12	0	0	4	16
4.	Jl. Banjarsari	43	2	7	8	60
5.	Jl. Timoho Raya	22	3	4	1	30
6.	Jl. Gondang Raya	17	0	2	1	20
	Jumlah	178	9	26	21	234

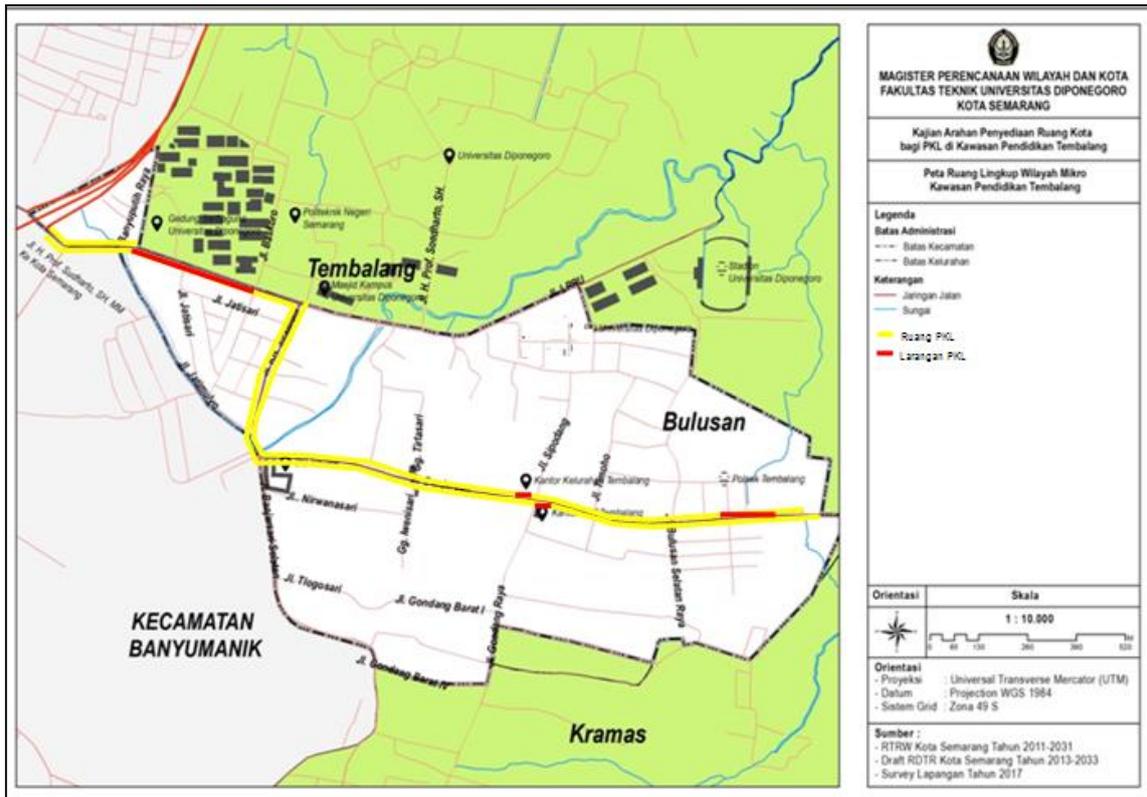
Sumber : Hasil Analisis, 2016

Ruang PKL Kota Semarang telah ditetapkan dalam SK Walikota Semarang No. 511.3/16 Tahun 2001 dengan lahan/ lokasi untuk area kawasan pendidikan Tembalang adalah sebagai berikut:

TABEL 3
PENETAPAN LAHAN/ LOKASI PKL DI KAWASAN PENDIDIKAN TEMBALANG BERDASARKAN
SK WALIKOTA SEMARANG NOMOR 511.3/16 TAHUN 2001 TANGGAL 17 JANUARI 2001

No.	Lokasi	Luas Areal	Batas Areal	Waktu Dasar	Keterangan
1.	Jl. Adipati Unus	150 x 3 = 450 m ²	Dari Jembatan Diponegoro s/d depan Toko Tembalang (pertigaan Masjid Kampus Undip saat ini)	16.00 – 04.00	Menempati pinggir jalan
2.	Jl. Sirajudin	150 x 3 = 450 m ²	Dari Toko Tembalang (pertigaan Masjid Kampus Undip saat ini) s/d Jembatan Kali Gambir	16.00 – 04.00	Menempati pinggir jalan
3.	Jl. Banjarsari	150 x 3 = 450 m ²	Dari Jembatan Kali Gambir s/d perempatan Bulusan	16.00 – 04.00	Menempati pinggir jalan
4.	Jl. Timoho Raya	100 x 3 = 300 m ²	Dari perempatan Bulusan s/d perempatan Meteseh	16.00 – 04.00	Menempati pinggir jalan

Sumber: Buku Saku PKL Kota Semarang Tahun 2008



Sumber: Buku Saku PKL Kota Semarang Tahun 2008

GAMBAR 2
KETERSEDIAAN LOKASI/ RUANG PKL DI KAWASAN PENDIDIKAN TEMBALANG
(PUKUL 16.00 – 04.00)

KAJIAN LITERATUR

Karakteristik PKL

PKL yaitu orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di tempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar (M.Gee dan Yeung, 1977). Mustafa (2008:42) dalam bukunya berpendapat bahwa PKL memiliki karakteristik yang khas, yaitu:

- Pola persebaran PKL umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa ijin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik (*depriving public space*).
- Para PKL umumnya memiliki daya resistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.
- Sebagai sebuah kegiatan usaha, PKL umumnya memiliki mekanisme involutif penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.
- Sebagian besar PKL adalah kaum migrant dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan daerah asal.
- PKL rata-rata tidak memiliki ketrampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal kota.

Sedangkan karakteristik aktivitas PKL dapat dirincikan sebagaimana berikut:

1. Karakteristik jenis dagangan, menurut McGee dan Yeung (1997):
 - Bahan mentah makanan dan makanan setengah jadi (*Unprocessed and semiprocessed foods*)

- Termasuk pada jenis dagangan ini adalah bahan mentah makanan seperti daging, buah dan sayuran. Selain itu juga dapat berupa barang-barang setengah jadi seperti beras.
- Makanan siap saji (*Prepared food*)
Termasuk dalam jenis dagangan ini berupa makanan atau minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang.
 - Non makanan (*Non foods*)
Termasuk jenis barang dagangan yang tidak berupa makanan contohnya baju, helm, aksesoris.
 - Jasa pelayanan (*Services*)
Jasa pelayanan yang diperdagangkan adalah jasa perorangan, seperti tukang membuat kunci, tukang membuat pigura, reparasi jam dan lain-lain.
2. Karakteristik sarana usaha, menurut Waworoentoe (dalam Widjajanti dalam Surya, 2013) meliputi:
 - Kios
 - Warung semi permanen
 - Gerobak/Kereta dorong
 - Jongkok/Meja
 - Gelaran/Alas
 - Pikulan/Keranjang
 3. Karakteristik pola penyebaran, menurut McGee dan Yeung meliputi:
 - Pola penyebaran memanjang (*linier concentration*)
Pola penyebaran ini dipengaruhi oleh pola jaringan jalan. Aktivitas jasa sektor informal (PKL) dengan pola penyebaran memanjang terjadi di sepanjang atau pinggir jalan utama atau pada jalan-jalan penghubungnya.
 - Pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*)
Pola penyebaran ini dijumpai pada ruang-ruang terbuka, taman, lapangan dan sebagainya. Pola ini dipengaruhi oleh pertimbangan faktor aglomerasi yaitu keinginan penjaja untuk melakukan pemusatan atau pengelompokkan penjaja.
 4. Karakteristik sifat pelayanan, meliputi:
 - Pedagang menetap (*static hawkers units*)
Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu.
 - Pedagang semi menetap (*semistatic hawkers units*)
Merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja dengan jangka waktu lama (ada batas waktu tertentu).
 - Pedagang keliling (*mobile hawkers units*)
Pedagang keliling adalah suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat untuk selalu berusaha mendatangi atau "mengejar" konsumen dengan bergerak atau berpindah-pindah tempat.

Kriteria Lokasi PKL

Lokasi menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan ekonomi khususnya perdagangan dan jasa. Lokasi memberikan pengaruh terhadap karakteristik *supply-demand* di suatu kawasan (Hidayati, 2014). Menurut Djojodipuro (1992), lokasi usaha ditentukan oleh sebaran *demand* dan ketergantungan lokasi terhadap usaha lain yang sejenis. Apabila dilihat dari *demand-supply*, PKL pada umumnya mendekati lokasi yang dianggap mampu memenuhi permintaan pasar. Kriteria lokasi PKL antara lain (Hidayati, 2014):

1. Lokasi strategis

2. Aksesibilitas tinggi
3. Persyaratan bangunan
 - a. Lokasi bisa pada pasar dan memiliki karakteristik barang perdagangan dan jasa
 - b. Lokasi harus memiliki sentra/ kios dan sarana prasarana pendukung
4. Peraturan pemerintah
 - a. Berada pada lahan aset negara dengan pengelolaan yang jelas
 - b. Retribusi yang sesuai dengan kebutuhan PKL

Kriteria lokasi untuk zona PKL menurut Munshi (2014) juga beberapa menunjukkan kriteria yang sama, yaitu:

- a. Berada pada kawasan komersial
- b. Kemudahan akses menuju lokasi
- c. Tersedianya tempat untuk menyimpan barang
- d. Kedekatan lokasi dengan pasar/ konsumen

Penataan Ruang PKL

Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam pasal 28 telah mengamahkan pengaturan kegiatan sektor informal dalam dokumen perencanaan tata ruang wilayah kota. Amanah penataan ruang untuk sektor informal tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bahwa dalam kriteria merumuskan rencana pola ruang diantaranya harus menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal. Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal masuk dalam pokok bahasan kawasan budidaya di dalam rencana pola ruang.

Sedangkan menurut McGee dan Yeung (1977), kebijaksanaan penataan ruang untuk sektor informal dapat dilakukan melalui pengelolaan dan pembinaan aktivitas PKL sebagaimana berikut:

1. Pengelolaan Lokasional

- Pemugaran atau relokasi
Tindakan dengan pemugaran suatu lokasi baik berupa pembangunan baru dengan fungsi yang berbeda dari semula maupun berupa perbaikan dari kondisi yang telah ada.
- Stabilisasi atau pengaturan
Berupa penataan fisik atau penempatan lokasi PKL pada suatu lokasi, antara lain:
 - a. Peruntukan dalam ruang terbuka (*open market*)
Dimaksudkan untuk memudahkan pergerakan konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan PKL ini dan diharapkan tidak mengganggu fungsi kota di lingkungan lokasi PKL.
 - b. Pembebasan atau penutupan jalan-jalan tertentu
Menutup jalan-jalan tertentu dan menutup sirkulasi lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor yang hanya diperuntukkan bagi pergerakan pejalan kaki. Tindakan ini biasanya bersifat temporer yaitu dilakukan dalam waktu-waktu tertentu saja.
 - c. Multifungsi ruang terbuka (taman, lapangan, ruang parkir, dan lain-lain)
Pemanfaatan ruang terbuka di sekitar kawasan perbelanjaan atau pusat keramaian pada waktu-waktu tertentu pada saat ruang tersebut kurang dimanfaatkan.
 - d. Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan atau trotoar
Menempatkan PKL pada jalan-jalan atau sebagian trotoar tertentu pada waktu tertentu yang sekiranya tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya. Setelah itu,

PKL tersebut wajib membersihkan ruang usahanya agar tidak mengganggu fungsi kota lainnya.

- Pemandahan atau *removal*
Dengan cara memindahkan sektor informal ke satu lokasi yang ditentukan berdasarkan penelitian sebelumnya.

2. Pengelolaan Struktural

Adapun yang termasuk dalam pengelolaan struktural adalah sebagai berikut:

- Perizinan
- Pembinaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

KETERSEDIAAN (SUPPLY) PKL

Aktivitas PKL

a. Jenis Usaha/ Dagangan

Berdasarkan hasil pengamatan di kawasan pendidikan Tembalang, jenis dagangan makanan dan minuman siap saji (*prepared food*) tersebar di seluruh lokasi, sedangkan jenis lainnya terkonsentrasi pada beberapa lokasi jalan. Adapun penjelasan masing-masing sebagaimana berikut:

- a. Makanan dan minuman siap saji mendominasi sebanyak 75% dari jumlah PKL yang ada dengan sebaran paling banyak berada di Jl. Prof. Soedharto yaitu sekitar 20% dari total responden, kemudian dilanjutkan di Jl. Banjarsari 19%, Jl. Sirajuddin sebanyak 16%, Jl. Timoho Raya sekitar 9%, Jl. Gondang Raya sekitar 7%, dan 4% ada di Jl. Jatimulyo.
- b. Bukan makanan menjadi jenis usaha PKL yang cukup banyak setelah makanan, yaitu sekitar 11,43% dari total PKL. PKL jenis ini paling banyak berada di Jl. Prof. Soedharto sekitar 4,29% dari total responden, kemudian Jl. Banjarsari sekitar 3%, dan masing-masing 1,4% ada di Jl. Sirajuddin, Jl. Gondang Raya dan Jl. Timoho Raya.
- c. Jasa berada pada urutan ketiga dengan persentase sekitar 8,57% dari total responden, dengan sebaran mendominasi ada di Jl. Banjarsari.
- d. Makanan mentah/ setengah jadi didominasi berada di Jl. Sirajuddin, Jl. Banjarsari, dan Jl. Timoho – Bulusan Raya dengan sebaran masing-masing sekitar 1,43%.

Sesuai dengan pernyataan Mc.Gee dan Yeung (1977) bahwasanya jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas di sekitarnya. Kawasan pendidikan Tembalang memiliki fungsi pengembangan sebagai pusat pendidikan tinggi memicu tumbuhnya aktivitas perdagangan dan jasa serta hunian untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Pekerja pada sektor perdagangan dan jasa, perkantoran maupun mahasiswa tentunya membutuhkan pangan dengan harga yang lebih miring dan mudah dijangkau sehingga memicu tumbuhnya sektor informal PKL dengan kebutuhan primer tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat An naf (dalam Widodo, 2000) yang berpendapat bahwa PKL pada umumnya memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder dengan harga yang lebih miring dan beberapa dapat dilakukan tawar menawar.

b. Sarana Dagang

Berdasarkan sarana dagang yang digunakan, PKL di kawasan pendidikan Tembalang sangat variatif mulai dari pikulan, gelaran, gerobak, hingga kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner di atas, dapat dilihat bahwa sarana gerobak menjadi sarana yang banyak digunakan oleh PKL (lebih dari 52%). Sarana gerobak ini juga variatif, ada yang berupa gerobak besar seperti untuk pedagang martabak dan gorengan, maupun gerobak

kecil yang biasa digunakan untuk pedagang makanan kecil seperti cilok, cimol, dll. Sarana fisik usaha lainnya adalah 13% menggunakan kios, 9% menggunakan gelaran/ alas, 4% menggunakan motor, 3% menggunakan mobil, dan 1,43% menggunakan meja/ jongkok. Kondisi tersebut sangat sesuai dengan pendapat Mc.Gee dan Yeung (1977), yaitu pada umumnya bentuk sarana PKL sangat sederhana dan mudah dibawa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual.

Sarana yang digunakan PKL di kawasan pendidikan Tembalang merupakan sarana yang mudah dipindah-pindahkan dan beberapa berupa semi permanen dikarenakan karakteristiknya yang sebagian besar memanfaatkan pinggir jalan sebagai tempat usaha dengan jangka waktu tertentu.

c. Pola Penyebaran dan Pelayanan PKL

Pola penyebaran PKL di kawasan pendidikan Tembalang cenderung bersifat linear mengikuti pola jaringan jalan. Hal ini ditunjukkan dari aktivitas PKL yang banyak memanfaatkan pinggir jalan di sepanjang koridor jalan utama kawasan. 77% PKL memanfaatkan bahu jalan, 7% berada di trotoar, 7% berada di emperan toko, 4% berada di emperan rumah, 3% di pinggir jalan, dan 2% menggunakan ruang parkir. Apabila dilihat dari aktivitasnya, PKL di kawasan ini cenderung berkelompok dalam melakukan usaha, yaitu sekitar 58,6% menyatakan berkelompok dengan PKL lainnya yang sejenis dan 41,4% lainnya menyatakan jauh dengan PKL yang sejenis/ bercampur dengan PKL lainnya. Pola pengelompokan PKL adalah berdasarkan jenis dagangannya.

Pola pelayanan PKL Tembalang sebagian besar adalah semi menetap (47%), 32% menetap, dan 21% memiliki sifat pelayanan keliling. Dominasi PKL semi menetap dikarenakan permintaan konsumen akan PKL cukup besar namun PKL belum memiliki ruang yang diperuntukkan khusus untuknya sehingga banyak PKL yang menempati lokasi yang ramai meskipun tidak diizinkan, seperti di area sekitar halte BRT Jl. Prof. Soedharto (seberang kampus Polines).

d. Lama Waktu Aktivitas

Waktu yang dimanfaatkan PKL di kawasan pendidikan Tembalang 37% cenderung mulai dari siang hari hingga malam hari (10.00 – 22.00). 34% PKL melakukan aktivitas sepanjang hari, 13% pada sore hari (14.00 – 18.00), 10% hanya di siang hari (10.00 – 14.00), dan masing-masing 3% berjualan di pagi hari (04.00 – 10.00) dan pagi hingga siang hari (08.00 – 12.00). Berdasarkan waktu aktivitas PKL tersebut, adanya SK Walikota yang menetapkan bahwa aktivitas PKL di pinggir jalan di kawasan ini dapat dilakukan pada pukul 16.00 – 04.00 WIB tidak relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. PKL di kawasan ini justru banyak melaksanakan usaha mulai dari pagi hari hingga malam hari.

Ruang PKL

Daya tampung ruang untuk PKL dapat dilihat dari ketersediaan lokasi PKL di dalam kebijakan lokasi/ lahan PKL Kota Semarang yang tertuang dalam SK Walikota Semarang Nomor 511.3/16 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Penetapan Lahan/ Lokasi PKL , untuk kawasan pendidikan Tembalang adalah seluas 1.650 m². Namun, ruang bagi PKL ini hanya disediakan pada pukul 16.00 – 04.00. Sedangkan pada waktu usaha diluar waktu tersebut, PKL tidak memiliki ruang untuk melakukan aktivitasnya. Beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan daya tampung ruang PKL ini adalah:

- a. Ketetapan SK walikota Nomor 511.3/16 Tahun 2001 sudah tidak menunjukkan/ tidak relevan dengan kondisi saat ini, dimana pada lokasi-lokasi yang ditetapkan saat ini PKL bukan hanya beroperasi pada waktu yang telah ditentukan namun hampir sepanjang hari.

- b. Lahan/ lokasi yang digunakan PKL untuk beroperasi saat ini sudah merambah ke lokasi-lokasi lainnya di luar ketentuan SK walikota Nomor 511.3/16 Tahun 2001, yaitu di Jalan Prof. Soedarto, Jalan Jatimulyo, Jalan Gondang Raya. Selain itu, gerobak-gerobak PKL banyak yang disimpan di lahan-lahan kosong sekitar permukiman.
- c. Munculnya permasalahan-permasalahan akibat keberadaan PKL, yaitu hilangnya hak pengguna jalan khususnya pejalan kaki, kemacetan lalu lintas akibat PKL yang menggunakan badan jalan dan ketiadaan ruang parkir.

Hingga saat ini, belum terdapat peraturan tentang PKL yang lebih operasional dengan melihat karakteristik PKL dan kebijakan-kebijakan penataan ruang di atasnya. Berdasarkan hasil kajian terhadap daya tampung ruang PKL di atas, **PKL memiliki ruang yang terbatas pada pukul 16.00 – 04.00 dengan area seluas 1.650 m² berada di Jl. Prof. Soedharto (Ex.Adi Patiunus), Jl. Sirojuddin, Jl. Banjarsari, dan Jl. Timoho Raya.**

KEBUTUHAN (DEMAND) PKL

Persepsi masyarakat dan motivasi kunjungan PKL

Masyarakat khususnya konsumen PKL merasa sangat terbantu dengan adanya PKL yang melakukan usahanya di kawasan pendidikan Tembalang. PKL juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hasil kuesioner, 86% penduduk sekitar merasa adanya PKL sangat bermanfaat bagi mereka. Hal ini dikarenakan kemudahan mereka untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan, yaitu kuliner menjadi pilihan paling tinggi. Sedangkan 14% penduduk sekitar merasa PKL tidak memberikan manfaat, karena mereka merasa PKL cenderung mengganggu dan dapat mengurangi pendapatan sektor formal.

Motivasi utama pengunjung dalam memilih PKL adalah kebersihan (34%). Faktor selanjutnya adalah kedekatan lokasi (27%), harga yang murah (22%), kenyamanan (10%), dan 7% faktor lainnya seperti ketersediaan parkir dan kualitas rasa makanan. Guna mendukung aktivitas PKL dan mempertimbangkan faktor yang memotivasi kunjungan terhadap PKL tersebut maka diperlukan ruang bagi PKL beraktivitas.

Preferensi Terhadap Aktivitas PKL

Jenis dagangan PKL yang diminati konsumen di kawasan pendidikan Tembalang paling banyak adalah makanan/minuman/kuliner (prepared food). Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, 73% konsumen memilih jenis dagangan tersebut sebagai kebutuhan utama mereka dari adanya PKL.

Menurut konsumen dan masyarakat sekitar di kawasan penelitian, sarana fisik yang digunakan PKL untuk berdagang adalah sarana yang dapat dipindahkan dan mudah untuk dibongkar. Sarana fisik yang dianjurkan baik pengunjung PKL maupun masyarakat di sekitar PKL adalah kios, gerobak, dan warung tenda.

Pengunjung/ konsumen dan penduduk sekitar PKL menyarankan agar PKL berjualan pada waktu antara pukul 12.00 – 22.00 WIB. Kondisi ini didukung dengan aktivitas pengunjung PKL yang berada di luar saat makan siang hingga waktu sore.

Forecast PKL

Berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat akan PKL di atas, dapat dilihat bahwasanya PKL dibutuhkan oleh konsumen dan penduduk sekitar untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga, wajar apabila jumlah PKL di kawasan pendidikan Tembalang ini semakin meningkat dari tahun ke tahun mengingat pertumbuhan aktivitas pendidikan yang juga semakin pesat. Kajian arahan penyediaan ruang bagi PKL ini perlu melihat proyeksi PKL ke depan, guna melihat kebutuhan dan daya tampung ruang bagi PKL yang ada nantinya.

Prediksi jumlah PKL dilihat dengan menggunakan *trendline* hingga akhir masa perencanaan (2031) sebagai berikut:

TABEL 4
PROYEKSI JUMLAH PKL DI KAWASAN PENDIDIKAN TEMBALANG TAHUN 2031

No.	Jalan	Jumlah PKL 2016 (Unit)	Persentase Sebaran PKL (%)	Proyeksi Jumlah PKL 2031 (Unit)
1.	Jl. Prof. Soedharto	63	26,9	165
2.	Jl. Sirajuddin	45	19,2	118
3.	Jl. Jatimulyo	16	6,8	42
4.	Jl. Banjarsari	60	25,6	157
5.	Jl. Timoho – Bulusan Raya	30	12,8	78
6.	Jl. Gondang Raya	20	8,5	52
	2016	234	100,0	
	2008	104		
	2031	612		612

Sumber : Hasil Analisis, 2017

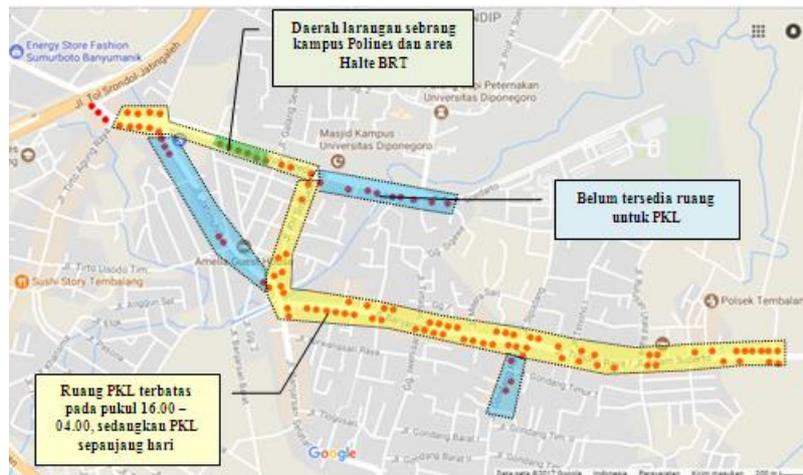
SUPPLY-DEMAND PKL

Apabila dilihat dari kondisi eksisting daya tampung dan kebutuhan ruang PKL pada saat ini, PKL belum memiliki ruang yang memadai aktivitas mereka sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Keseimbangan antara kebijakan dengan kebutuhan PKL terjadi pada ruang yang telah disediakan pada pukul 16.00 – 04.00. Sedangkan pada waktu diluar jam tersebut PKL tidak memiliki ruang beraktivitas, sedangkan PKL di kawasan pendidikan Tembalang ini memiliki karakteristik usaha yang tidak terbatas waktu (sepanjang hari). Berikut perbandingan daya tampung ruang dan kebutuhan ruang PKL eksisting di kawasan pendidikan Tembalang:

TABEL 5
PERBANDINGAN DAYA TAMPUNG DAN KEBUTUHAN RUANG PKL DI KAWASAN PENDIDIKAN TEMBALANG

No.	Lokasi	Ketersediaan Ruang/ Daya Tampung	PKL Eksisting	
			Unit	(m ²)
1	Jl. Prof. Soedharto	450 m ² (pada pukul 16.00 - 04.00)	63	258
2	Jl. Sirajuddin	450 m ² (pada pukul 16.00 - 04.00)	45	170.25
3	Jl. Banjarsari	450 m ² (pada pukul 16.00 - 04.00)	60	238.5
4	Jl. Timoho Raya	300 m ² (pada pukul 16.00 - 04.00)	30	130.5
5	Jl. Jatimulyo	Belum tersedia ruang PKL	16	51
6	Jl. Gondang Raya	Belum tersedia ruang PKL	20	72.75
	Total	1.650 (pada pukul 16.00 – 04.00)		921
	Sirkulasi (100%)			921
	Total	1.650 (pada pukul 16.00 – 04.00)		1.842

Sumber : Hasil Analisis, 2017



Sumber : Hasil Analisis, 2017

GAMBAR 3
PERBANDINGAN PKL DENGAN RUANG YANG TERSEDIA DI KAWASAN PENDIDIKAN
TEMBALANG

Berdasarkan hasil perhitungan dan gambaran di atas, ketersediaan PKL dan ruang yang ada pada saat ini sudah cukup memenuhi kebutuhan pada posisi aktivitas PKL pukul 16.00 – 04.00. Sedangkan pada waktu diluar jam tersebut PKL belum diberikan ruang untuk beraktivitas sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan ruang dengan kebutuhan PKL.

TABEL 6
PERBANDINGAN DAYA TAMPUNG DAN ESTIMASI KEBUTUHAN RUANG PKL MENDATANG
DI KAWASAN PENDIDIKAN TEMBALANG

No.	Lokasi	Ketersediaan Ruang/ Daya Tampung	Estimasi PKL	
			Unit	(m ²)
1	Jl. Prof. Soedharto	450 m ² (pada pukul 16.00 - 04.00)	165	811
2	Jl. Sirajuddin	450 m ² (pada pukul 16.00 - 04.00)	118	1125,25
3	Jl. Banjarsari	450 m ² (pada pukul 16.00 - 04.00)	157	1433,25
4	Jl. Timoho Raya	300 m ² (pada pukul 16.00 - 04.00)	78	682,95
5	Jl. Jatimulyo	Belum tersedia ruang PKL	42	513,75
6	Jl. Gondang Raya	Belum tersedia ruang PKL	52	455,3
	Total	1.650 (pada pukul 16.00 – 04.00)	612	5021,5
	Sirkulasi (100%)			5021,5
	Total	1.650 (pada pukul 16.00 – 04.00)		10.043

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Pada masa yang akan datang (2031), kebutuhan ruang PKL meningkat sesuai dengan pertambahan jumlah PKL, sehingga diperlukan penyediaan ruang melalui pengelolaan PKL yang tepat. Estimasi kebutuhan ruang di masa mendatang adalah 5.021,5 m², sedangkan ruang yang tersedia saat ini hanya 1.650 m² (terbatas pada pukul 16.00 – 04.00). **Perbandingan antara daya tampung ruang PKL dengan kebutuhan ruang di masa mendatang masih kurang/ belum mampu menampung kebutuhan PKL.** Oleh karena itu, diperlukan arahan penyediaan ruang PKL yang dapat mengakomodir perkembangan PKL sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan keberlanjutan penataan ruang.

ARAHAN PENYEDIAAN RUANG PKL

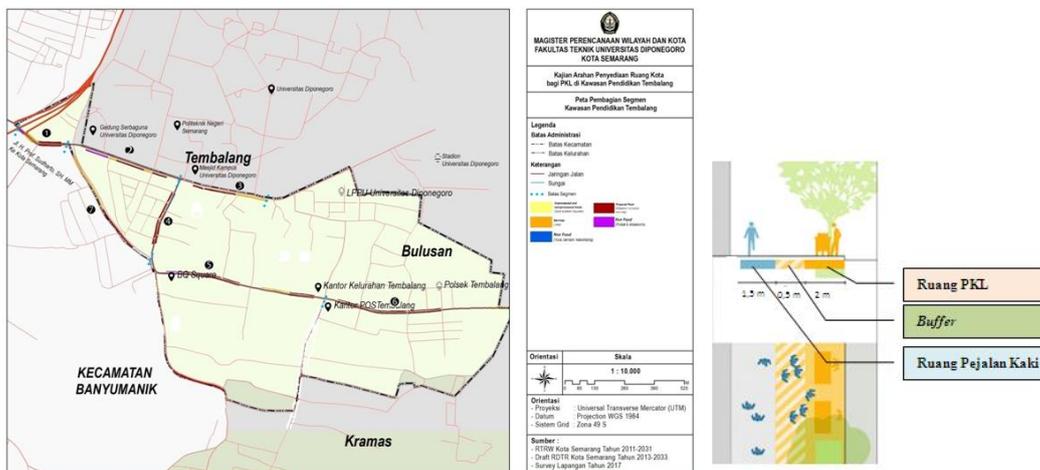
Lokasi PKL sangat terkait dengan preferensi PKL dalam memilih tempat usaha. PKL di Kawasan Pendidikan Tembalang 83% memilih dekat dengan pendidikan, 14% dekat dengan permukiman, dan 3% dekat perdagangan dan jasa. Hal ini mengindikasikan PKL mendekati pasar, lokasi yang ramai. Kebijakan RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, mengarahkan pengelolaan PKL melalui penataan bersama dengan penataan sektor formal. Selain itu, PKL membutuhkan lokasi yang strategis dan aksesibel ke depan.

Arahan Struktural

- a. Pendataan dan pengurusan perizinan PKL agar dapat meningkatkan PAD Kota Semarang.
- b. Pembinaan dengan memberikan sosialisasi terkait kebijakan penataan ruang dan kebijakan terkait PKL, bimbingan dan penyuluhan tentang penataan PKL agar tidak mengganggu aktivitas lainnya sehingga tercipta simbiosis mutualisme.
- c. Pemberian bantuan permodalan, agar meningkatkan penataan fisik PKL dan kualitas usaha dan hidup sektor informal.

Arahan Lokasional

Berdasarkan hasil kajian, penyediaan ruang PKL diarahkan pada koridor Jl. Prof. Soedharto, Jl. Sirojuddin, Jl. Banjarsari, Jl. Timoho Raya, dan Jl. Jatimulyo. Berdasarkan kajian terhadap beberapa literatur, pemanfaatan trotoar harus memperhatikan ruang gerak pejalan kaki minimal yaitu 1,5 meter dengan lebar trotoar yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan komersial (multi fungsi) minimal memiliki lebar 4 meter. Dengan melihat arahan dalam rencana tata ruang dan pertimbangan-pertimbangan dalam penataan PKL, maka model penempatan PKL pada trotoar di kawasan pendidikan Tembalang adalah 1,5 m untuk pejalan kaki, 0,5 m sebagai buffer, dan 2 m sebagai ruang aktivitas PKL.



Sumber: Hasil Analisis, 2017 dan Adaptasi dari NACTO, 2016

GAMBAR 4
ARAHAN RUANG BAGI PKL DI KAWASAN PENDIDIKAN TEMBALANG

KESIMPULAN

Arahan penyediaan ruang bagi PKL di kawasan pendidikan Tembalang diarahkan pada penataan PKL secara lokasional sesuai dengan karakteristik aktivitas dan rencana tata ruang ke depan disertai dengan pola struktural melalui sosialisasi dan pembinaan kepada PKL untuk menata ruangnya. Ketersediaan ruang PKL di kawasan pendidikan Tembalang sebagaimana tercantum dalam SK Walikota No. 511.3/16 Tahun 2001 belum mengakomodir

aktivitas PKL di kawasan ini. Diperlukan peninjauan kembali/ evaluasi terhadap kebijakan penetapan lokasi PKL Kota Semarang dengan lebih melihat pada karakteristik dan kebutuhan PKL dan konsumen. Oleh karena itu, dalam penentuan arahan penyediaan ruang kota bagi PKL perlu mempertimbangkan karakteristik aktivitas PKL, kebutuhan ruang PKL, preferensi PKL, konsumen dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayati, Nurani Nurul. 2014. Kajian Formalisasi PKL di Kawasan Pasar Waru, Semarang. Tesis Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro
- McGee, T.G. dan Y.M. Yeung. 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*. Ottawa: International Development Research Centre.
- Munshi, Avik. 2014. Integrating Vendors in City Planning. Dalam <http://portfolio.cept.ac.in/integrating-street-vendors-in-city-planning/>
- Mustafa, Ali Achsan, Juni 2008. *Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*. Malang : In-TRANS Publishing.
- National Association of City Transportation Officials (NACTO). 2016. *Global Street Design Guide*. New York: Island Press
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031
- Rukmana, Deden. 2005. Pedagang Kaki Lima dan Informalitas Perkotaan. Available at <http://www.uplink.or.id/content/view/212/68/lang,id/>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2015.
- Sulistianto. 2008. Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pendidikan Tembalang. Tugas Akhir Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro
- Surat Keputusan Walikota Semarang No. 511.3/6 Tahun 2001 tentang lokasi PKL di Kota Semarang.
- Surya, Octora Lintang. 2013. Formalisasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima Semarang. Tesis Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro